

**RENCANA KERJA (RENJA)
PERUBAHAN
PEMERINTAH KECAMATAN KELUANG
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KECAMATAN KELUANG
Jalan Raya Keluang – Mekar Jaya 30754**



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KECAMATAN KELUANG

Jalan Raya Keluang – Mekar Jaya Kode Pos 30754

KEPUTUSAN CAMAT KELUANG
NOMOR : 101 /KPTS/KEC.KLG/VI/2025

TENTANG

**TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
PEMERINTAH KECAMATAN KELUANG TAHUN 2025**

CAMAT KELUANG

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Keluang Tahun 2023 maka dipandang perlu menunjuk personil yang bertanggungjawab atas penyelesaian tugas tersebut.
- b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, maka tim penyusun Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Pemerintah Kecamatan Keluang ditetapkan dengan Keputusan Camat Keluang

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara) Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Nomor 050-5889 Tahun 2021

tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

16. INMENDAGRI Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 40);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016-2036;
20. Peraturan Daerah kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
21. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 85 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin;
22. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Pemerintah Kecamatan Keluang 2025.
- KEDUA : Tim tersebut pada ketetapan pertama keputusan ini bertanggung jawab atas pengkajian hingga penyelesaian penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Pemerintah Kecamatan Keluang 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila dipandang perlu akan diubah seperlunya

Ditetapkan di : Keluang
Pada tanggal : 26 Juni 2025

Plt. CAMAT KELUANG,



GUNAWAN, SKM., M.Si

NIP. 19720806 199203 1 003

Lampiran Surat Keputusan Camat Keluang
Nomor : 101 /KPTS/KEC.KLG/VI/2025
Tanggal : 26 Juni 2025

**TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
KECAMATAN KELUANG TAHUN 2025**

JABATAN DALAM TIM	NAMA/NIP	JABATAN DALAM INSTANSI
Ketua Tim	Gunawan, SKM..M.Si NIP. 19720806 199203 1 003	Plt.Camat Keluang
Sekretaris	Didi Afrika, S.Pd., M.Si NIP. 19760909 200801 1 003	Kasi PPDK
Anggota	Bambang Heriyanto, SE NIP. 19810625 200701 1002	Kasi Pelayanan Umum
Anggota	Fajri Noprianto, S.STP NIP. 19951104 201706 1 001	Kasi Pemerintahan
Anggota	Fahrur Rozi, S.IP., M.Si NIP. 19670707 201407 1 001	Kasi Ketentraman dan Ketertiban
Anggota	Darwin, SH NIP. 19770725 200701 1 010	Kasi Kessos
Anggota	Deni Firmansyah, SE NIP. 19801226 200212 1002	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
Anggota	Anggelia Novika Dewi, A.Md. NIP. 19881124 202012 2 001	Pengelola Program dan Laporan

Plt. CAMAT KELUANG,



**GUNAWAN, SKM.,M.Si
NIP. 19720806 199203 1 003**



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASI KECAMATAN KELUANG

Alamat : Jalan Raya Keluang – Mekar Jaya Kode Pos 30754

KEPUTUSAN CAMAT KELUANG NOMOR : 102 /KPTS/KEC.KLG/VI/2025

TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN PEMERINTAH KECAMATAN KELUANG TAHUN 2025

CAMAT KELUANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 Tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, dan pasal 5 ayat (2)
- b. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Camat Keluang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
9. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Organisasi Kecamatan Kabupaten Musi Banyuasin;
10. INMENDAGRI Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi banyuasin (Lembar Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomo 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi banyuasin Tahun 2017 – 2022 (Berita

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 11);

10. Peraturan Bupati Nomor 268 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
11. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026;
12. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026;
13. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kerja (Renja) Perubahan Pemerintah Kecamatan Keluang Tahun Anggaran 2025

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Keluang
PADA TANGGAL : 26 Juni 2025

Plt. CAMAT KELUANG,



GUNAWAN, SKM., M.Si
NIP. 19720806 199203 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga *Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025* Kecamatan Keluang ini dapat disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika kebijakan, kebutuhan pembangunan, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya.

Renja Perubahan Kecamatan Keluang Tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan prioritas yang telah diselaraskan dengan perubahan kondisi aktual, baik dari aspek regulasi, anggaran, maupun kebutuhan masyarakat. Penyusunan dokumen ini mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan memperhatikan hasil Musrenbang, aspirasi pemangku kepentingan, serta capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memiliki keterbatasan dan ruang untuk penyempurnaan. Oleh karena itu, masukan dan saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi terwujudnya perencanaan yang lebih responsif, efektif, dan berkelanjutan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan Renja Perubahan ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2025, serta mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

Plt CAMAT KELUANG,



GUNAWAN, SKM., M.Si
NIP. 19720806 199203 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Keluang.....	13
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	5
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD	16
BAB IV PENUTUP.....	25

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Keluang Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan, dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin. Namun, dalam pelaksanaannya, dinamika sosial, ekonomi, dan kebijakan nasional maupun daerah seringkali mengalami perubahan yang signifikan, sehingga diperlukan penyesuaian terhadap rencana kerja yang telah disusun sebelumnya.

Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Keluang dilatar belakangi oleh beberapa faktor utama, antara lain:

-  **Perubahan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah** Adanya penyesuaian terhadap kebijakan pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin, baik dari aspek regulasi maupun fokus program prioritas, yang berdampak langsung pada pelaksanaan kegiatan di tingkat kecamatan.
-  **Evaluasi Pelaksanaan Renja Awal Tahun 2025** Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja awal menunjukkan perlunya revisi terhadap target, indikator kinerja, maupun alokasi anggaran agar lebih realistis dan sesuai dengan kondisi aktual.
-  **Perkembangan Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat** Dinamika kebutuhan masyarakat, termasuk dampak dari perubahan ekonomi, kondisi infrastruktur, dan pelayanan publik, menuntut adanya respons kebijakan yang adaptif dan solutif.
-  **Penyesuaian Alokasi Anggaran dan Sumber Daya** Terjadi perubahan dalam struktur anggaran dan ketersediaan sumber daya yang memerlukan penyesuaian terhadap program dan kegiatan yang direncanakan.

Dengan latar belakang tersebut, Renja Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Keluang disusun sebagai instrumen perencanaan yang lebih responsif, akuntabel, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta arah pembangunan daerah. Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan kecamatan secara efektif dan efisien.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Keluang tahun 2025 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); RKPd KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021 BAB I PENDAHULUAN I-6
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312) ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005- 2025; RKPD KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021 BAB I PENDAHULUAN I-8
14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin;
17. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 81 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 Nomor 67).
18. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin No 55 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020.
19. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 268 Tahun 2021 Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 Nomor 67).
20. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026;

21. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026;
22. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 Tahun 2025;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Keluang Tahun 2025 adalah untuk memberikan pedoman dan arahan bagi Kecamatan Keluang dalam melaksanakan perubahan terhadap program dan kegiatan dalam tahapan perubahan di tahun 2025 sesuai hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan sampai dengan triwulan II (dua) tahun 2025.

Tujuan Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Keluang Tahun 2025 antara lain untuk :

1. Mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan Kantor Camat Keluang sampai dengan triwulan dua tahun 2025.
2. Mengoptimalkan Peran dan Fungsi Perencanaan dalam pembangunan Daerah;
3. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Akuntabel, Partisipatif, Bermanfaat, Tepat Sasaran dan Berkesinambungan;
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan Daerah; serta
5. Mewujudkan sinkronisasi antara substansi dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 dengan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Keluang Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penyusunan

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Kecamatan Keluang dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Kecamatan Keluang serta hambatan dan permasalahan yang terjadi. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun 2025 TRIWULAN II ditentukan dari hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024.

Pelaksanaan program dan Kegiatan pada tahun tahun 2025 antara lain :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Bahan Material
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Mebel

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

- Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa

- Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
- Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Evaluasi capaian hasil indikator Rencana kinerja Tahun 2025 sampai dengan triwulan II secara lengkap dalam Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Keluang tahun 2025 sampai dengan triwulan II.

Table 2.1

REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

KECAMATAN KELUANG

KODE	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PENYERAPAN KEUANGAN				PENCAPAIAN TARGET KEUANGAN	INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUT) S/D TW II BULAN JUNI				PENCAPAIAN TARGET FISIK	LOKASI
			TARGET		REALISASI			NARASI	VOL/ SATUAN	TARGET FISIK (%)	REALISASI FISIK (%)		
			RP.	%	RP.	%							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.32	Kecamatan Keluang	4.283.758.632,00	1.425.318.639,35	33,27	1.853.432.137,00	43,27				33,11	44,73		
1.01.7.01.32.1.01.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.913.674.031,00	1.265.910.918,90	32,35	1.765.677.137,00	45,12				31,73	46,32		
1.01.7.01.32.1.01.1.02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.396.000,00	18.096.000,00	84,58	14.729.600,00	68,84				84,58	69,15		
1.01.7.01.32.1.01.1.02.01.02.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.796.000,00	14.796.000,00	100,00	14.729.600,00	99,55	Tidak Tercapai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	100,00	100,00	Tercapai	Kecamatan Keluang
1.01.7.01.32.1.01.1.02.01.02.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.600.000,00	3.300.000,00	50,00	0,00	0,00	Tidak Tercapai	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	50,00	0,00	Tidak Tercapai	Kecamatan Keluang
1.01.7.01.32.1.01.1.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.072.619.938,00	895.970.981,40	29,16	1.386.334.934,00	45,12				29,16	46,54		
1.01.7.01.32.1.01.1.02.02.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.072.619.938,00	895.970.981,40	29,16	1.386.334.934,00	45,12				29,16	46,54		Kecamatan Keluang

KODE	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PENYERAPAN KEUANGAN				PENCAPAIAN TARGET KEUANGAN	INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUT) S/D TW II BULAN JUNI				PENCAPAIAN TARGET FISIK	LOKASI
			TARGET		REALISASI			NARASI	VOL/ SATUAN	TARGET FISIK (%)	REALISASI FISIK (%)		
			RP.	%	RP.	%							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.986.569.938,00	895.970.981,40	30,00	1.300.284.934,00	43,54	Tercapai	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	25 Orang/Bulan	30,00	45,00	Tercapai	Kecamatan Keluang
	2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Gagal Bayar TA. 2024)	86.050.000,00	0,00	0,00	86.050.000,00	100,00	Tercapai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/Bulan	0,00	100,00	Tercapai	Kecamatan Keluang
1.01.7.01.32.1.01.1.02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.538.000,00	20.538.000,00	100,00	20.538.000,00	100,00				100,00	100,00		
1.01.7.01.32.1.01.1.02.05.02.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	20.538.000,00	20.538.000,00	100,00	20.538.000,00	100,00	Tercapai	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	21 Paket	100,00	100,00	Tercapai	Kecamatan Keluang
1.01.7.01.32.1.01.1.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	283.847.478,00	124.321.130,00	43,80	126.331.418,00	44,51				43,80	47,01		
1.01.7.01.32.1.01.1.02.06.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.998.436,00	2.499.609,00	25,00	4.994.900,00	49,96	Tercapai	Jumlsh Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	20 Paket	25,00	50,00	Tercapai	Kecamatan Keluang
1.01.7.01.32.1.01.1.02.06.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74.897.694,00	37.448.847,00	50,00	53.760.000,00	71,78	Tercapai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	10 Paket	50,00	75,00	Tercapai	Kecamatan Keluang
1.01.7.01.32.1.01.1.02.06.02.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.981.554,00	9.990.777,00	50,00	11.149.308,00	55,80	Tercapai	Jumlah paket Peralatan rumah Tangga yang disediakan	30 Paket	50,00	57,00	Tercapai	Kecamatan Keluang
1.01.7.01.32.1.01.1.02.06.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.999.794,00	19.999.897,00	50,00	22.219.400,00	55,55	Tercapai	Jumlah Paket Bahan Logistik	31 Paket	50,00	60,00	Tercapai	Kecamatan Keluang
1.01.7.01.32.1.01.1.02.06.02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.240.000,00	10.344.000,00	60,00	0,00	0,00	Tidak Tercapai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4 Paket	60,00	0,00	Tidak Tercapai	Kecamatan Keluang

KODE	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PENYERAPAN KEUANGAN				PENCAPAIAN TARGET KEUANGAN	INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUT) S/D TW II BULAN JUNI				PENCAPAIAN TARGET FISIK	LOKASI
			TARGET		REALISASI			NARASI	VOL/ SATUAN	TARGET FISIK (%)	REALISASI FISIK (%)		
			RP.	%	RP.	%							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.01.7.01.32.1.01.1.02.06.02.06.07	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Belum Berjalan	Jumlah Paket Bahan/material yang disediakan	20 Paket	0,00	0,00	Belum Berjalan	Kecamatan Keluang
1.01.7.01.32.1.01.1.02.06.02.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000,00	10.000.000,00	40,00	0,00	0,00	Tidak Tercapai	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	40,00	0,00	Tidak Tercapai	Kecamatan Keluang
1.01.7.01.32.1.01.1.02.06.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.730.000,00	34.038.000,00	60,00	34.207.810,00	60,30	Tercapai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	60,00	65,00	Tercapai	Kecamatan Keluang
1.01.7.01.32.1.01.1.02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	48.141.948,00	24.070.974,00	50,00	47.441.000,00	98,54				50,00	100,00		
1.01.7.01.32.1.01.1.02.07.02.07.05	Pengadaan Mebel	48.141.948,00	24.070.974,00	50,00	47.441.000,00	98,54	Tercapai	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	10 Unit	50,00	100,00	Tercapai	Kecamatan Keluang
1.01.7.01.32.1.01.1.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	292.190.667,00	146.095.333,50	50,00	153.621.761,00	52,58				40,00	50,00		
1.01.7.01.32.1.01.1.02.08.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.000.000,00	27.000.000,00	50,00	19.916.161,00	36,88	Tidak Tercapai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	40,00	50,00	Tercapai	Kecamatan Keluang
1.01.7.01.32.1.01.1.02.08.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	238.190.667,00	119.095.333,50	50,00	133.705.600,00	56,13	Tercapai	Jumlah laporan penyediaan jasa Pelayanan umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	40,00	50,00	Tercapai	Kecamatan Keluang
1.01.7.01.32.1.01.1.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	174.940.000,00	36.818.500,00	21,05	16.680.424,00	9,53				23,90	11,27		
1.01.7.01.32.1.01.1.02.09.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	78.840.000,00	31.536.000,00	40,00	16.680.424,00	21,16	Tidak Tercapai	Jumlah kendaraan Dinas Operasional	2 Unit	45,00	25,00	Tidak Tercapai	Kecamatan Keluang

KODE	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PENYERAPAN KEUANGAN				PENCAPAIAN TARGET KEUANGAN	INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUT) S/D TW II BULAN JUNI				PENCAPAIAN TARGET FISIK	LOKASI
			TARGET		REALISASI			NARASI	VOL/ SATUAN	TARGET FISIK (%)	REALISASI FISIK (%)		
			RP.	%	RP.	%							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perizinannya					
1.01.7.01.32.1.01.1.02.09.02.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	74.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Belum Berjalan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	2 Unit	0,00	0,00	Belum Berjalan	Kecamatan Keluang
1.01.7.01.32.1.01.1.02.09.02.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.130.000,00	5.282.500,00	25,00	0,00	0,00	Tidak Tercapai	Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	2 Unit	30,00	0,00	Tidak Tercapai	Kecamatan Keluang
1.01.7.01.32.1.01.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	353.229.601,00	157.172.720,45	44,50	87.755.000,00	24,84				49,39	29,33		
1.01.7.01.32.1.01.2.02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	333.851.601,00	152.928.220,45	45,81	87.755.000,00	26,29				50,73	31,03		
1.01.7.01.32.1.01.2.02.01.02.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	333.851.601,00	152.928.220,45	45,81	87.755.000,00	26,29		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	6 Dokumen	50,73	31,03		Kecamatan Keluang
	1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	328.951.601,00	148.028.220,45	45,00	82.855.000,00	25,19	Tidak Tercapai	Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan	6 Dokumen	50,00	30,00	Tidak Tercapai	Kecamatan Keluang
	2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.900.000,00	4.900.000,00	100,00	4.900.000,00	100,00	Tercapai	Terselenggaranya dokumen Peningkatan Efektif Kegiatan	6 Dokumen	100,00	100,00	Tercapai	Kecamatan Keluang

KODE	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PENYERAPAN KEUANGAN				PENCAPAIAN TARGET KEUANGAN	INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUT) S/D TW II BULAN JUNI				PENCAPAIAN TARGET FISIK	LOKASI
			TARGET		REALISASI			NARASI	VOL/ SATUAN	TARGET FISIK (%)	REALISASI FISIK (%)		
			RP.	%	RP.	%							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Kecamatan (Gagal Bayar TA. 2024)							Pemerintahan di Tingkat kecamatan					
1.01.7.01.32.1.01.2.02.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	16.978.000,00	4.244.500,00	25,00	0,00	0,00				30,00	0,00		
1.01.7.01.32.1.01.2.02.02.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16.978.000,00	4.244.500,00	25,00	0,00	0,00	Tidak Tercapai	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	30,00	0,00	Tidak Tercapai	Kecamatan Keluang
1.01.7.01.32.1.01.2.02.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		
1.01.7.01.32.1.01.2.02.04.02.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Belum Berjalan	Jumlah LaporanPelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	2 Laporan	0,00	0,00	Belum Berjalan	Kecamatan Keluang
1.01.7.01.32.1.01.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		
1.01.7.01.32.1.01.4.02.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		
1.01.7.01.32.1.01.4.02.02.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau	5.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Belum Berjalan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan	2 Laporan	0,00	0,00	Belum Berjalan	Kecamatan Keluang

KODE	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PENYERAPAN KEUANGAN				PENCAPAIAN TARGET KEUANGAN	INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUT) S/D TW II BULAN JUNI				PENCAPAIAN TARGET FISIK	LOKASI
			TARGET		REALISASI			NARASI	VOL/ SATUAN	TARGET FISIK (%)	REALISASI FISIK (%)		
			RP.	%	RP.	%							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Kepolisian Negara Republik Indonesia							Peraturan Perundang-undangan dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					
1.01.7.01.32.1.01.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		
1.01.7.01.32.1.01.5.02.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		
1.01.7.01.32.1.01.5.02.01.02.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	7.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Belum Berjalan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, regional, dan Nasional	25 Orang	0,00	0,00	Belum Berjalan	Kecamatan Keluang
1.01.7.01.32.1.01.6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	4.470.000,00	2.235.000,00	50,00	0,00	0,00				50,00	0,00		
1.01.7.01.32.1.01.6.02.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.470.000,00	2.235.000,00	50,00	0,00	0,00				50,00	0,00		
1.01.7.01.32.1.01.6.02.01.02.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4.470.000,00	2.235.000,00	50,00	0,00	0,00	Tidak Tercapai	Jumlah Laporan Koordinasi Pendamoingan desa di Wilayahnya	14 Laporan	50,00	0,00	Tidak Tercapai	Kecamatan Keluang

Berdasarkan Tabel 2.1 diatas kesimpulan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kecamatan Keluang sampai dengan triwulan II tahun 2025 berupa:

1. Sub Kegiatan yang telah memenuhi target/telah dilaksanakan (Tercapai) adalah sebanyak 10 sub kegiatan.
2. Sub kegiatan yang tidak memenuhi target karena belum dilaksanakan (Tidak Tercapai) adalah sebanyak 10 sub kegiatan.
3. Sub kegiatan yang tidak dilaksanakan pada Tahun berjalan yaitu sebanyak 6 sub kegiatan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Keluang

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Keluang dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Meningkatnya fasilitas Kegiatan Kabupaten
- Meningkatnya Pelayanan Administrasi perkantoran
- Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Meningkatnya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Keluang meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain :

Lingkungan Internal

Kekuatan :

- Visi dan misi organisasi yang jelas
- Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan
- Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan
- Kewenangan koordinasi di tingkat kecamatan
- Adanya sarana dan prasarana

Kelemahan :

- kualitas SDM yang belum kompeten
- Belum Optimalnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan instansi teknis lainnya
- Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi organisasi
- Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan

Lingkungan Eksternal**Peluang :**

- RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023– 2026
- Agenda pembangunan tahunan kabupaten Musi Banyuasin
- Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
- Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik
- Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan
- Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
- Diklat peningkatan kualitas aparatur
- Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat
- Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram

Ancaman :

- Sarana dan Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai
- Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan
- Praktek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya
- Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masyarakat.
- Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat
- Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan kualitas.

Kecamatan Keluang dalam menyusun program kegiatan mengacu pada RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026. Mendasarkan pada tolak ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja Kecamatan Keluang terdapat dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Camat Keluang
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target SPM/ standar nasional	Target IKK	Target Renstra SKPD		Realisasi Capaian		TW II	Penanggung jawab
				n-2 (2023)	n-1 (2024)	n-2 (2023)	n-1 (2024)	n(2025)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	85%	90%	83,91 %	86,61%	95%	Kasi Pelayanan umum
2	Persentase pemerintah Desa/Kel yang di bina	-	-	85%	90%	100%	100%	95%	Kasi PPDK

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Keluang bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

- 1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Musi Banyuasin kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Musi Banyuasin;
- 2) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Pelayanan Prima. Kecamatan Keluang sebagai salah satu PD di Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat;

- 4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Recana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap perangkat daerah (PD) dalam mengoperasikan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Pelaksanaan kegiatan RKPD perubahan Tahun 2025 harus dilakukan secara efektif dan efisien, Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten/kota maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip safe guarding yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi. Penerapan prinsip safe guarding akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan Untuk Itu Rencana kerja dan Pendanaan Daerah Kecamatan Keluang.

Rencana program dan kegiatan dalam dokumen rencana kerja perubahan Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 berdasarkan hasil input sistem RKPD Online (eplan.mubakab.go.id), pada tahapan Finalisasi Rancangan Akhir RKPD perubahan tahun 2025 , adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pemerintah Kecamatan Keluang

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN KE			
			TUJUAN/SASARAN	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan pelayanan umum yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat	Indeks Kepuasan masyarakat	85 %	90%	95 %	100 %
			Persentase pemerintah Desa/Kel yang di bina	85 %	90 %	95 %	100 %

Tabel 3.2
Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Musi Banyu Asin Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA					PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025									
		KECAMATAN KELUANG					6.992.481.456,00	4.541.453.123,00	5.309.617.687,00	-1.682.863.769,00			7.176.015.000,00				
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				6.992.481.456,00	4.541.453.123,00	5.309.617.687,00	-1.682.863.769,00				7.176.015.000,00				
	7.01	KECAMATAN				6.992.481.456,00	4.541.453.123,00	5.309.617.687,00	-1.682.863.769,00				7.176.015.000,00				
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan dan Perkantoran	100 %	100 %	4.112.497.456,00	3.961.469.123,00	4.901.466.687,00	618.502.544,00				4.731.000.000,00				
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Penganggaran Evaluasi Kinerja Perangkat Daera Terselenggaranya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	34.965.012,00	34.965.012,00	21.565.200,00	-13.399.812,00			Kecamatan Keluang	50.000.000,00	KECAMATAN KELUANG			
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	14.965.200,00	14.965.200,00	14.965.200,00	0,00	Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH		25.000.000,00	KECAMATAN KELUANG			

	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	4 Laporan	4 Laporan	19.999.812,00	19.999.812,00	6.600.000,00	-13.399.812,00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH		25.000.000,00	KECAMATAN KELUANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	100 %	100 %	3.109.764.938,00	2.986.569.938,00	4.024.378.993,00	914.614.055,00			Kecamatan Keluang	3.560.000.000,00	KECAMATAN KELUANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	3.109.764.938,00	2.986.569.938,00	4.024.378.993,00	914.614.055,00	Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA		3.560.000.000,00	KECAMATAN KELUANG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Terselenggaranya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terselenggaranya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah</i>	100 %	100 %	64.788.000,00	64.788.000,00	20.538.000,00	-44.250.000,00			Kecamatan Keluang	70.000.000,00	KECAMATAN KELUANG
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya												
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	21 Paket	21 Paket	20.538.000,00	20.538.000,00	20.538.000,00	0,00	Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH		20.000.000,00	KECAMATAN KELUANG

	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	2 Orang	2 Orang	44.250.000,00	44.250.000,00	0,00	-44.250.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH		50.000.000,00	KECAMATAN KELUANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah</i>	100 %	100 %	344.873.558,00	344.873.558,00	280.611.879,00	-64.261.679,00			Kecamatan Keluang	482.000.000,00	KECAMATAN KELUANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	20 Paket	20 Paket	9.998.436,00	9.998.436,00	9.998.436,00	0,00	Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH		12.000.000,00	KECAMATAN KELUANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	10 Paket	10 Paket	74.897.694,00	74.897.694,00	74.897.694,00	0,00	Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH		60.000.000,00	KECAMATAN KELUANG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	30 Paket	30 Paket	19.981.554,00	19.981.554,00	19.981.554,00	0,00	Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH		30.000.000,00	KECAMATAN KELUANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	31 Paket	31 Paket	39.999.794,00	39.999.794,00	39.999.794,00	0,00	Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH		60.000.000,00	KECAMATAN KELUANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan												

			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	4 Paket	4 Paket	34.996.080,00	34.996.080,00	17.240.000,00	-17.756.080,00	Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH		20.000.000,00	KECAMATAN KELUANG
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material												
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>	20 Paket	20 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH		50.000.000,00	KECAMATAN KELUANG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA					PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	20 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH		150.000.000,00	KECAMATAN KELUANG			
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	53.494.401,00	-46.505.599,00	Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH		100.000.000,00	KECAMATAN KELUANG			

	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Kantor Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	48.141.948,00	48.141.948,00	48.141.948,00	0,00			Kecamatan Keluang	30.000.000,00	KECAMATAN KELUANG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel												
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	48.141.948,00	48.141.948,00	48.141.948,00	0,00	Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH		30.000.000,00	KECAMATAN KELUANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Terselenggaranya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 % 12 Bulan	100 % 12 Bulan	335.024.000,00	307.190.667,00	331.290.667,00	-3.733.333,00			Kecamatan Keluang	424.000.000,00	KECAMATAN KELUANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	54.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH		65.000.000,00	KECAMATAN KELUANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	281.024.000,00	253.190.667,00	277.290.667,00	-3.733.333,00	Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		359.000.000,00	KECAMATAN KELUANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	174.940.000,00	174.940.000,00	174.940.000,00	0,00			Kecamatan Keluang	115.000.000,00	KECAMATAN KELUANG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												

			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	78.840.000,00	78.840.000,00	78.840.000,00	0,00	Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH		80.000.000,00	KECAMATAN KELUANG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	74.970.000,00	74.970.000,00	74.970.000,00	0,00	Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH		15.000.000,00	KECAMATAN KELUANG
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	21.130.000,00	21.130.000,00	21.130.000,00	0,00	Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH		20.000.000,00	KECAMATAN KELUANG
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Keluang)	100 %	100 %	535.019.000,00	535.019.000,00	391.296.000,00	-130.019.000,00				405.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Kegiatan pemerintah di Tingkat Kecamatan Terselenggaranya koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	100 %	100 %	496.918.000,00	496.918.000,00	371.918.000,00	-125.000.000,00			KAB MUSI BANYUASIN	365.000.000,00	KECAMATAN KELUANG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan												
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	6 Dokumen	496.918.000,00	496.918.000,00	371.918.000,00	-125.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		365.000.000,00	KECAMATAN KELUANG

	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	terlaksananya Penyelenggaraan Pelayanan PATEN Terlaksananya penyelenggaraan Pelayanan PATEN	100 %	100 %	33.106.000,00	33.106.000,00	16.978.000,00	-16.128.000,00			KAB MUSI BANYUASIN	35.000.000,00	KECAMATAN KELUANG
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	33.106.000,00	33.106.000,00	16.978.000,00	-16.128.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		35.000.000,00	KECAMATAN KELUANG
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100 %	100 %	4.995.000,00	4.995.000,00	2.400.000,00	-2.595.000,00			Kecamatan Keluang	5.000.000,00	KECAMATAN KELUANG
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan												
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	2 Laporan	4.995.000,00	4.995.000,00	2.400.000,00	-2.595.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		5.000.000,00	KECAMATAN KELUANG
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	2.300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00				2.000.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terselenggaranya Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa	100 %	100 %	2.300.000.000,00	0,00	0,00	-2.300.000.000,00			Kecamatan Keluang	2.000.000.000,00	KECAMATAN KELUANG
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA				
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025							
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	5 Laporan	5 Laporan	2.300.000.000, 00	0,00	0,00	-2.300.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		2.000.000.000,00	KECAMATAN KELUANG	
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kec. Keluang	100 %	100 %	10.650.000,00	10.650.000,00	5.325.000,00	4.350.000,00				15.000.000,00		
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	<i>Terselenggaranya penegakan Peraturan Daerah Terselenggaranya Penegakan Peraturan Daerah</i>	100 %	100 %	10.650.000,00	10.650.000,00	5.325.000,00	-5.325.000,00			Masyarakat Kecamatan Keluang	15.000.000,00	KECAMATAN KELUANG	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia													
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>	2 Laporan	2 Laporan	10.650.000,00	10.650.000,00	5.325.000,00	-5.325.000,00	Kab. Musi Banyuasin , Keluang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		15.000.000,00	KECAMATAN KELUANG	

5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan (Kec. Keluang)	100 %	100 %	14.015.000,00	14.015.000,00	7.060.000,00	-14.000.000,00				15.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Terselenggaranya Forkompinda tingkat Kecamatan Terselenggaranya Forkopimcam</i>	100 %	100 %	14.015.000,00	14.015.000,00	7.060.000,00	-6.955.000,00			Masyarakat Kecamatan Keluang	15.000,00	KECAMATAN KELUANG
	7.01.05.2.01.000 4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional												
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional</i>	25 Orang	25 Orang	14.015.000,00	14.015.000,00	7.060.000,00	-6.955.000,00	Kab. Musi Banyuasin , Keluang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		15.000,00	KECAMATAN KELUANG
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jumlah Desa yang dibina Kec. Keluang	100 %	100 %	20.300.000,00	20.300.000,00	4.470.000,00	4.700.000,00				25.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa Terselenggaranya Fasilitasi dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Desa</i>	100 %	100 %	20.300.000,00	20.300.000,00	4.470.000,00	-15.830.000,00			Masyarakat Kecamatan Keluang	25.000.000,00	KECAMATAN KELUANG
	7.01.06.2.01.001 5	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa												
			<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa</i>	3 Dokumen	3 Dokumen	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	-11.300.000,00	Kab. Musi Banyuasin , Keluang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		15.000.000,00	KECAMATAN KELUANG
	7.01.06.2.01.001 7	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya												

			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya</i>	14 Laporan	14 Laporan	9.000.000,00	9.000.000,00	4.470.000,00	-4.530.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		10.000.000,00	KECAMATAN KELUANG
	J U M L A H					6.992.481.456,00	4.541.453.123,00	5.309.617.687,00	-1.682.863.769,00				7.176.015.000,00	

		KELURAHAN KELUANG					841.784.711	841.784.711	841.784.711				850.000.000	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN					841.784.711	841.784.711	841.784.711				850.000.000	
	7.01	KECAMATAN					841.784.711	841.784.711	841.784.711				850.000.000	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kec. Keluang)	100 %	100 %	149.929.259	149.929.259	149.929.259					150.000.000	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	terlaksananya Penyelenggaraan Pelayanan PATEN Terlaksananya penyelenggaraan Pelayanan PATEN	100 %	100 %	149.929.259	149.929.259	149.929.259				KAB MUSI BANYUASIN	150.000.000	KECAMATAN KELUANG
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	12 Laporan	12 Laporan	149.929.259	149.929.259	149.929.259		Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		150.000.000,00	KECAMATAN KELUANG
2.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KELURAHAN	Persentase penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Desa dan kelurahan (Kel. Keluang)	100 %	100 %	691.855.452	691.855.452	691.855.452					700.000.000	

		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>terlaksananya kegiatan pemberdayaan</i>	100 %	100 %	691.855.452	691.855.452	691.855.452				KAB MUSI BANYUASIN	700.000.000	KECAMATAN KELUANG
		Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan												
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan</i>	2 Unit	2 Unit	347.593.088	347.593.088	347.593.088		Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		350.000.000,00	KECAMATAN KELUANG
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	5 Pokmas /Ormas	5 Pokmas /Ormas	344.262.364	344.262.364	344.262.364		Kab. Musi Banyuasin, Keluang, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)		350.000.000,00	KECAMATAN KELUANG

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Keluang Tahun 2025 disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan situasi dan kondisi aktual, baik dari aspek kebijakan nasional maupun kebutuhan masyarakat di tingkat kecamatan. Dokumen ini merupakan acuan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin serta hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan.

Perubahan Renja ini mencerminkan komitmen Kecamatan Keluang untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan wilayah, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Setiap program dan kegiatan yang direncanakan telah mempertimbangkan aspek efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan, guna mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan.

Dengan tersusunnya Renja Perubahan Tahun 2025 ini, diharapkan seluruh perangkat kecamatan, desa, serta pemangku kepentingan lainnya dapat bersinergi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dirancang. Monitoring dan evaluasi akan dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa pelaksanaan rencana kerja berjalan sesuai dengan target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Keluang, serta menjadi landasan dalam mewujudkan pembangunan yang lebih baik dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Keluang, 26 Juni 2025

Plt. **CAMAT KELUANG,**



GUNAWAN, SKM., M.Si

Pembina

NIP. 19720806 199203 1 003